

OPTIMALISASI DANA DESA SEBAGAI INSTRUMEN PENGGERAK PERTUMBUHAN EKONOMI LOKAL: STUDI KUALITATIF DI KAPANEWON PURWOSARI

Dwi Listiyani¹, Unggul Priyadi²

^{1,2}Program Studi Magister Ilmu Ekonomi, Fakultas Bisnis dan Ekonomika, Universitas Islam Indonesia, Yogyakarta Indonesia

Email: d.listiya25@gmail.com

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan menganalisis optimalisasi Dana Desa sebagai instrumen penggerak pertumbuhan ekonomi lokal di Kapanewon Purwosari, Kabupaten Gunungkidul. Fokus penelitian meliputi realisasi pemanfaatan Dana Desa, strategi dan mekanisme penerapannya, sasaran prioritas, serta perspektif para pemangku kepentingan dalam pengelolaan Dana Desa. Penelitian menggunakan pendekatan kualitatif dengan desain studi kasus dan perspektif fenomenologis untuk memahami pengalaman serta praktik para pelaku pengelolaan Dana Desa. Data diperoleh melalui wawancara semi-terstruktur, observasi, dan dokumentasi. Informan terdiri atas 26 orang yang mencakup Panewu, Lurah, Carik, BAMUSK, pengelola BUMK, dan tokoh masyarakat. Analisis data dilakukan melalui tahapan pengumpulan, reduksi, pengolahan, penyajian, dan penarikan kesimpulan dengan bantuan NVivo 12 melalui coding, word cloud, hierarchy diagram, project map, dan mind map. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pada 2025 Dana Desa telah direalisasikan sesuai ketentuan dengan fokus pada ketahanan pangan, kemandirian ekonomi, ekonomi kreatif, BUMK, serta pembangunan fisik dan nonfisik. Pada 2026, penurunan alokasi Dana Desa menyebabkan pergeseran prioritas menuju kegiatan nonfisik dan penyesuaian skala program. Optimalisasi Dana Desa tidak hanya ditentukan oleh besaran anggaran, tetapi oleh kapasitas sumber daya manusia, kelembagaan ekonomi, partisipasi masyarakat, tata kelola, pendampingan, dan kemampuan memetakan potensi lokal. Temuan penting lainnya adalah adanya trade-off antara kebutuhan infrastruktur dasar dan pengembangan ekonomi produktif. Oleh karena itu, optimalisasi Dana Desa perlu diarahkan pada penguatan BUMK, UMKM, ketahanan pangan, kapasitas SDM, perencanaan berbasis potensi lokal, dan monitoring berkelanjutan agar Dana Desa tidak berhenti sebagai instrumen pembiayaan pembangunan, tetapi berkembang menjadi instrumen transformasi ekonomi lokal.

Kata kunci: *Dana Desa; Pertumbuhan Ekonomi Lokal; Optimalisasi; Bumkal; Pemberdayaan Masyarakat; Kapanewon Purwosari.*

ABSTRACT

This study examines the optimization of Village Funds as an instrument for driving local economic growth in Purwosari Subdistrict, Gunungkidul Regency. The study focuses on the realization of Village Fund utilization, implementation strategies and mechanisms, priority targets, and the perspectives of stakeholders involved in Village Fund management. A qualitative approach with a case-study design and phenomenological perspective was employed to understand the experiences and practices of Village Fund managers. Data were collected through semi-structured interviews, observation, and document analysis. The study involved 26 informants comprising the subdistrict head, village heads, village secretaries, village consultative representatives, village-owned enterprise managers, and community representatives. Data were analyzed through data collection, reduction, processing, display, and conclusion drawing, supported by NVivo 12 using coding, word clouds,

hierarchy diagrams, project maps, and mind maps. The findings indicate that in 2025 Village Funds were implemented in accordance with prevailing regulations, with major attention to food security, village economic self-reliance, creative economy, village-owned enterprises, and physical and non-physical development. In 2026, declining Village Fund allocations shifted priorities toward non-physical activities and required adjustments to program scales. Optimization is determined not merely by the amount of funding, but by human-resource capacity, local economic institutions, community participation, governance, mentoring, and the ability to map local potential. A key finding is the policy trade-off between basic infrastructure needs and productive economic development. Therefore, Village Fund optimization should emphasize strengthening village-owned enterprises, MSMEs, food security, human-resource capacity, locally grounded planning, and continuous monitoring so that Village Funds function not merely as a financing instrument but as an instrument of local economic transformation.

Keywords: *Village Fund; Local Economic Growth; Optimization; Village-Owned Enterprise; Community Empowerment; Purwosari.*

PENDAHULUAN

Desa merupakan salah satu basis strategis dalam pembangunan nasional karena memiliki kedekatan langsung dengan masyarakat serta karakteristik sosial, ekonomi, dan geografis yang beragam¹. Posisi tersebut menjadikan desa tidak hanya sebagai objek pembangunan, tetapi juga sebagai subjek yang memiliki kewenangan dalam merencanakan dan mengelola pembangunan berdasarkan kebutuhan serta potensi lokal. Penguatan kewenangan tersebut antara lain diwujudkan melalui kebijakan Dana Desa yang memberikan dukungan fiskal kepada desa untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan, pemberdayaan masyarakat, dan pengembangan potensi ekonomi lokal. Dalam perspektif pembangunan daerah², Dana Desa tidak semata-mata berfungsi sebagai sumber pembiayaan pembangunan fisik, tetapi juga memiliki potensi sebagai instrumen untuk mendorong aktivitas ekonomi produktif, memperluas kesempatan kerja, meningkatkan pendapatan masyarakat, dan memperkuat kemandirian ekonomi desa³.

Permasalahan yang muncul bukan hanya berkaitan dengan besarnya Dana Desa yang diterima, tetapi juga dengan kemampuan pemerintah desa dalam mengalokasikan dan mengelolanya agar menghasilkan manfaat ekonomi yang berkelanjutan. Pembangunan infrastruktur dasar memang diperlukan untuk meningkatkan konektivitas, akses pelayanan, dan kualitas lingkungan masyarakat. Namun, peningkatan belanja pembangunan fisik tidak dengan sendirinya menghasilkan peningkatan produktivitas dan kesejahteraan ekonomi masyarakat apabila tidak diikuti dengan penguatan kapasitas ekonomi lokal⁴. Oleh karena itu, optimalisasi Dana Desa perlu diarahkan pada kombinasi antara pembangunan infrastruktur pendukung dan pengembangan kegiatan produktif, seperti usaha

¹ Ahmad, Zakly Hanafi, Mukhammad Akhmad Najich Alfayn, and Akhdiva Elfi Istiqoh. "Analisis upaya strategis dalam memaksimalkan penerapan pelayanan publik berbasis e-government di desa." *Jurnal Ilmiah Universitas Batanghari Jambi* 22.3 (2022): 1432-1437.

² Rahmatillah, Tri Putri, et al. "Strategi Pengembangan Desa Wisata Berbasis Wisata Alam dan Budaya Sebagai Media Promosi Desa Sangiang." *Jurnal Planoearth* 4.2 (2019): 111-116.

³ Rachman, Rani Auliawati, Dadang Sugiana, and H. Rohanda. "Strategi sukses transformasi perpustakaan desa berbasis inklusi sosial untuk masyarakat sejahtera (studi pada Perpustakaan Desa Gampingan Gemar Membaca Malang)." *Seminar Nasional MACOM III Universitas Padjadjaran*. Vol. 908. 2019.

⁴ Diartika, Firda, and Retno Widodo Dwi Pramono. "Program pembangunan kawasan perdesaan: Strategi pengembangan desa berbasis keterkaitan desa-kota." *Jurnal Pembangunan Wilayah Dan Kota* 17.4 (2021): 372-384.

mikro, kecil, dan menengah (UMKM), Badan Usaha Milik Kalurahan (BUMKal), ketahanan pangan, ekonomi kreatif, pengembangan pariwisata, penguatan kapasitas sumber daya manusia, serta pemanfaatan sumber daya dan potensi lokal. Tantangan tersebut semakin kompleks ketika pemerintah desa harus menentukan prioritas penggunaan anggaran di tengah keterbatasan fiskal, kebutuhan pembangunan dasar yang masih tinggi, serta tuntutan masyarakat terhadap manfaat pembangunan yang dapat dirasakan secara langsung⁵.

Kondisi tersebut relevan untuk dikaji di Kapanewon Purwosari, Kabupaten Gunungkidul, Daerah Istimewa Yogyakarta. Wilayah ini memiliki karakteristik ekonomi yang berkaitan dengan pertanian lahan kering, peternakan, UMKM, dan potensi pariwisata. Di sisi lain, kondisi geografis, keterbatasan sumber daya air, serta akses terhadap pusat-pusat kegiatan ekonomi menjadi tantangan tersendiri dalam pengembangan ekonomi masyarakat. Struktur Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan (APBKal) pada lima kalurahan di Kapanewon Purwosari tahun 2025 juga menunjukkan bahwa pendapatan transfer masih menjadi komponen penting dalam pembiayaan pembangunan, sedangkan Pendapatan Asli Kalurahan relatif terbatas. Situasi tersebut menunjukkan bahwa Dana Desa memiliki posisi strategis dalam menopang kapasitas fiskal kalurahan, tetapi sekaligus memperlihatkan adanya tantangan dalam membangun kemandirian fiskal dan ekonomi lokal.

Dalam konteks tersebut, persoalan utama bukan sekadar bagaimana Dana Desa direalisasikan, melainkan sejauh mana penggunaannya mampu menghasilkan perubahan ekonomi yang relevan dengan kebutuhan masyarakat dan potensi wilayah⁶. Optimalisasi dalam penelitian ini tidak dipahami sebagai upaya memaksimalkan besaran anggaran yang dibelanjakan, tetapi sebagai proses memastikan bahwa Dana Desa dialokasikan secara tepat sasaran, sesuai dengan kebutuhan dan potensi lokal, melibatkan masyarakat, memperkuat kelembagaan ekonomi, serta memberikan manfaat yang dapat dipertahankan dalam jangka panjang⁷. Dengan pendekatan tersebut, keberhasilan Dana Desa perlu dilihat dari proses pengambilan keputusan, mekanisme implementasi, keterlibatan aktor, kesesuaian program dengan potensi lokal, serta manfaat ekonomi yang dirasakan masyarakat.

Sejumlah kajian mengenai Dana Desa telah banyak membahas aspek pengelolaan keuangan⁸, pembangunan infrastruktur, pemberdayaan masyarakat, dan kontribusinya terhadap kesejahteraan. Namun, kajian yang secara khusus melihat Dana Desa sebagai instrumen penggerak pertumbuhan ekonomi lokal melalui perspektif para aktor yang terlibat dalam proses perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi masih perlu diperkuat. Terlebih lagi, karakteristik setiap wilayah menyebabkan efektivitas pemanfaatan Dana Desa tidak dapat dilepaskan dari kondisi geografis, struktur ekonomi, kapasitas pemerintah kalurahan, kelembagaan lokal, serta tingkat partisipasi masyarakat⁹. Dengan

⁵ Jubaedah, Siti, and Otto Fajarianto. "Model pengembangan desa wisata berbasis kearifan lokal sebagai strategi peningkatan ekonomi masyarakat di desa cupang kecamatan gempol kabupaten cirebon." *Abdimas Awang Long* 4.1 (2021): 1-12.

⁶ Pratama, Fajar Giri, and Ganjar Kurnia. "Strategi Pengembangan Desa Wisata Berbasis Masyarakat (Studi Kasus: Desa Lebakmuncang, Kecamatan Ciwidey, Kabupaten Bandung)." *Jurnal Ilmiah Mahasiswa Agroinfo Galuh* 5.1 (2019): 1014-1028.

⁷ Sutiarto, M. A., et al. "Strategi pengembangan pariwisata berbasis budaya di Desa Selumbung, Karangasem-Bali." *Jurnal Pariwisata Budaya* 3.2 (2018): 15-23.

⁸ Hamzah, Asep. "Strategi pengembangan UMKM Desa Cibingbin menuju entrepreneurs village berbasis sumberdaya alam." *Jurnal Pengabdian Dinamika* 9.2 (2022): 36-44.

⁹ Hidayatullah, Fitra Ayuningtyas, and Tri Suminar. "Strategi pemberdayaan masyarakat berbasis potensi lokal Candi Plaosan melalui program desa wisata untuk kemandirian ekonomi di Desa Bugisan Kecamatan Prambanan Kabupaten Klaten." *Lifelong Education Journal* 1.1 (2021): 1-11.

demikian, diperlukan pendekatan yang mampu menjelaskan proses dan konteks pengelolaan Dana Desa secara lebih mendalam, bukan hanya mengukur besaran anggaran atau output program.

Berdasarkan kondisi tersebut, penelitian ini bertujuan untuk menganalisis optimalisasi Dana Desa sebagai instrumen penggerak pertumbuhan ekonomi lokal di Kapanewon Purwosari. Secara khusus, penelitian ini mengkaji: (1) realisasi pemanfaatan Dana Desa dalam mendukung aktivitas ekonomi lokal; (2) strategi, mekanisme, dan praktik pengelolaan Dana Desa dalam mendorong kegiatan ekonomi produktif; (3) sasaran prioritas penggunaan Dana Desa yang berkaitan dengan pengembangan ekonomi masyarakat; dan (4) perspektif pemangku kepentingan mengenai efektivitas, manfaat, dan keberlanjutan pengelolaan Dana Desa. Pendekatan kualitatif digunakan untuk memperoleh pemahaman yang lebih mendalam mengenai pengalaman, persepsi, praktik, dan dinamika antaraktor dalam pengelolaan Dana Desa.

Penelitian ini diharapkan memberikan kontribusi secara akademik dan praktis. Secara akademik, penelitian memperkaya kajian mengenai kebijakan fiskal desa dengan menempatkan Dana Desa sebagai instrumen pembangunan ekonomi lokal yang dianalisis berdasarkan konteks kelembagaan dan sosial-ekonomi wilayah. Secara praktis, hasil penelitian dapat menjadi bahan evaluasi bagi pemerintah kalurahan dan pemangku kepentingan dalam merancang penggunaan Dana Desa yang lebih responsif terhadap potensi lokal, memperkuat kegiatan ekonomi produktif, dan meningkatkan keberlanjutan manfaat pembangunan. Dengan demikian, optimalisasi Dana Desa diharapkan tidak berhenti pada pencapaian output pembangunan, tetapi mampu menghasilkan outcome ekonomi yang lebih nyata bagi masyarakat Kapanewon Purwosari.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan desain studi kasus deskriptif. Pendekatan kualitatif dipilih karena penelitian bertujuan memperoleh pemahaman secara mendalam mengenai proses pemanfaatan Dana Desa, strategi pengelolaan, keterlibatan para pemangku kepentingan, hambatan implementasi, serta manfaatnya dalam mendukung aktivitas ekonomi lokal¹⁰. Desain studi kasus digunakan karena penelitian berfokus pada fenomena pengelolaan Dana Desa dalam konteks spesifik, yaitu Kapanewon Purwosari, Kabupaten Gunungkidul, Daerah Istimewa Yogyakarta. Dengan desain tersebut, penelitian tidak diarahkan untuk menguji hubungan kausal secara statistik, tetapi untuk memahami secara kontekstual bagaimana Dana Desa direncanakan, dilaksanakan, dan dimanfaatkan sebagai instrumen penggerak ekonomi lokal.

Penelitian dilaksanakan di Kapanewon Purwosari, Kabupaten Gunungkidul, Daerah Istimewa Yogyakarta, yang mencakup lima kalurahan, yaitu Kalurahan Giriasih, Grogol, Karangduwet, Girijati, dan Kalurahan Purwosari. Pemilihan lokasi dilakukan secara purposive dengan pertimbangan bahwa wilayah tersebut memiliki karakteristik ekonomi lokal yang beragam, meliputi pertanian, peternakan, UMKM, dan potensi pariwisata, serta masih menghadapi keterbatasan dalam kapasitas fiskal dan akses terhadap pusat kegiatan ekonomi. Kondisi tersebut menjadikan Kapanewon Purwosari relevan untuk mengkaji bagaimana Dana Desa dimanfaatkan dalam mendukung pengembangan ekonomi lokal.

¹⁰ Musianto, Lukas S. "Perbedaan pendekatan kuantitatif dengan pendekatan kualitatif dalam metode penelitian." *Jurnal Manajemen dan kewirausahaan* 4.2 (2002): 123-136.

Informan penelitian ditentukan menggunakan purposive sampling¹¹, yaitu pemilihan informan berdasarkan pertimbangan bahwa mereka memiliki pengetahuan, pengalaman, kewenangan, atau keterlibatan langsung dalam perencanaan, pengelolaan, pengawasan, dan pemanfaatan Dana Desa. Informan terdiri atas 1 Panewu, 5 Ketua BAMUSKal, 5 Lurah, 5 Carik, 5 Kepala BUMKal, dan 5 tokoh masyarakat, sehingga jumlah keseluruhan informan sebanyak 26 orang. Komposisi tersebut digunakan untuk memperoleh perspektif yang beragam, baik dari unsur pemerintah kapanewon, pemerintah kalurahan, kelembagaan ekonomi, lembaga perwakilan masyarakat, maupun masyarakat sebagai penerima manfaat program.

Data penelitian terdiri atas data primer dan data sekunder¹². Data primer diperoleh melalui wawancara mendalam dengan informan dan observasi terhadap proses serta aktivitas yang berkaitan dengan pengelolaan dan pemanfaatan Dana Desa. Data sekunder diperoleh dari dokumen perencanaan dan penganggaran kalurahan, APBKal, dokumen realisasi Dana Desa, laporan pelaksanaan kegiatan, dokumen BUMKal, peraturan perundang-undangan, serta dokumentasi lain yang relevan dengan tujuan penelitian. Penggunaan kedua jenis data tersebut dimaksudkan untuk memperoleh gambaran yang utuh mengenai hubungan antara kebijakan, praktik pengelolaan, dan manfaat ekonomi yang dihasilkan.

Teknik pengumpulan data dilakukan melalui observasi partisipatif pasif, wawancara semi-terstruktur, dan dokumentasi¹³. Observasi partisipatif pasif dilakukan dengan mengamati kegiatan dan kondisi yang berkaitan dengan pemanfaatan Dana Desa tanpa terlibat secara langsung dalam aktivitas yang diamati. Wawancara semi-terstruktur digunakan untuk menggali informasi mengenai proses perencanaan, penentuan prioritas, mekanisme pelaksanaan, bentuk pemberdayaan ekonomi, hambatan, manfaat, serta persepsi informan terhadap keberlanjutan program. Sementara itu, dokumentasi digunakan untuk melengkapi dan memverifikasi informasi hasil observasi dan wawancara melalui penelaahan dokumen resmi serta bukti pelaksanaan kegiatan.

Analisis data dilakukan secara interaktif dengan mengacu pada model Miles, Huberman, dan Saldaña, yang meliputi proses kondensasi data, penyajian data, serta penarikan dan verifikasi kesimpulan. Tahap kondensasi data dilakukan melalui proses seleksi, pemfokusan, penyederhanaan, pengodean, dan pengelompokan data hasil wawancara, observasi, dan dokumentasi sesuai dengan fokus penelitian. Data selanjutnya disajikan dalam bentuk uraian tematik, matriks, dan visualisasi hubungan antartema untuk memudahkan identifikasi pola dan keterkaitan antar-temuan. Tahap terakhir dilakukan melalui penarikan kesimpulan secara bertahap yang terus diverifikasi dengan membandingkan data antarinforman dan antarsumber.

Untuk membantu proses pengorganisasian dan analisis data kualitatif, penelitian menggunakan NVivo 12. Perangkat lunak tersebut digunakan untuk melakukan proses coding, mengelompokkan data berdasarkan tema, mengidentifikasi keterkaitan antarkategori, serta membantu visualisasi hasil analisis melalui word *cloud*, *hierarchy diagram*, *project map*, dan *mind map*. Penggunaan NVivo berfungsi sebagai alat bantu analisis dan tidak menggantikan proses interpretasi peneliti terhadap konteks dan makna data.

¹¹ Mappasere, Stambol A., and Naila Suyuti. "Pengertian penelitian pendekatan kualitatif." *Metode penelitian sosial* 33 (2019): 1-10.

¹² Sujarweni, V. Wiratna. "Metodelogi penelitian." *Yogyakarta: Pustaka Baru Perss* 74.11 (2014).

¹³ Surayya, Rahmi. "Pendekatan kualitatif dalam penelitian kesehatan." *AVERROUS: Jurnal Kedokteran Dan Kesehatan Malikussaleh* (2015): 75-83.

Keabsahan data dijaga melalui triangulasi sumber dan triangulasi teknik. Triangulasi sumber dilakukan dengan membandingkan informasi yang diperoleh dari Panewu, pemerintah kalurahan, BAMUSKal, pengelola BUMKal, dan tokoh masyarakat. Sementara itu, triangulasi teknik dilakukan dengan membandingkan hasil wawancara, observasi, dan dokumentasi. Apabila ditemukan perbedaan informasi, peneliti melakukan penelusuran dan verifikasi lebih lanjut terhadap sumber data serta dokumen yang relevan. Proses tersebut dilakukan untuk meningkatkan kredibilitas temuan dan memastikan bahwa interpretasi penelitian didasarkan pada data yang konsisten dan dapat dipertanggungjawabkan.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Realisasi Dana Desa sebagai Penggerak Ekonomi Lokal

Hasil analisis menunjukkan bahwa realisasi Dana Desa di Kapanewon Purwosari pada 2025 telah berjalan sesuai ketentuan dengan orientasi pada ketahanan pangan, kemandirian ekonomi desa, ekonomi kreatif, BUMKal, serta pembangunan fisik dan nonfisik. Word cloud penelitian memperlihatkan dominasi tema desa, dana, masyarakat, program, pembangunan, kalurahan, dan ekonomi. Hal tersebut menunjukkan bahwa Dana Desa dipahami bukan hanya sebagai sumber pembiayaan infrastruktur, tetapi juga sebagai instrumen pemberdayaan ekonomi.

Pada tingkat implementasi, Dana Desa digunakan untuk penguatan kelembagaan desa, percepatan pertumbuhan ekonomi, ketahanan pangan, dan pembangunan infrastruktur. Capaian langsung yang ditemukan mencakup pengentasan kemiskinan, peningkatan layanan publik, dukungan pendidikan dan kesehatan, serta kegiatan ekonomi desa. Dengan demikian, implementasi Dana Desa masih bersifat integratif antara pembangunan fisik dan nonfisik¹⁴.

Temuan tersebut sejalan dengan perspektif Local Economic Development bahwa infrastruktur tetap menjadi fondasi, tetapi dampak ekonomi yang lebih berkelanjutan memerlukan penguatan kelembagaan dan kapasitas pelaku ekonomi. Dalam konteks Purwosari, BUMKal memiliki posisi strategis karena dapat menjadi penghubung antara pemerintah kalurahan, masyarakat, potensi lokal, dan pasar. Fungsi ini membuat BUMKal berpotensi menjadi instrumen transformatif apabila mampu mengelola kegiatan usaha secara produktif dan berkelanjutan.

Strategi, Mekanisme, dan Dinamika Implementasi

Perubahan paling menonjol terjadi pada 2026 ketika alokasi Dana Desa menurun. Penurunan anggaran menyebabkan penyesuaian skala program, penurunan pendanaan infrastruktur, pengurangan sejumlah insentif, dan pergeseran fokus APBDKal menuju kegiatan pemberdayaan serta prioritas nasional. Pada saat yang sama, kalurahan terdorong melakukan pemetaan potensi lokal sebagai sumber alternatif dan menyesuaikan pendanaan kegiatan.

Dinamika lain muncul melalui pelaksanaan Koperasi Desa Merah Putih (KDMP). Temuan wawancara menunjukkan adanya kekhawatiran dari sebagian pemangku kepentingan bahwa kebijakan yang seragam dapat bertabrakan dengan unit usaha yang sudah berjalan di tingkat lokal. Persoalan yang mengemuka bukan sekadar penerimaan atau penolakan program, tetapi kebutuhan sinkronisasi kebijakan, kejelasan pembagian peran, ketepatan sasaran, dan perlindungan terhadap ekosistem ekonomi lokal.

Di sisi lain, penelitian menemukan faktor keberhasilan berupa transparansi, akuntabilitas, tata kelola administratif, tanggung jawab pengelola, pola pikir visioner, partisipasi masyarakat, kolaborasi

¹⁴ Muiz, Rizqi Nuralili, et al. "Dinamika dan Strategi Implementasi Kompensasi di Satuan Pendidikan." *Jurnal Administrasi Pendidikan Islam* 7.2 (2025): 162-175.

lintas sektor, serta kepemimpinan partisipatif. Faktor-faktor tersebut memperlihatkan bahwa efektivitas Dana Desa sangat dipengaruhi oleh kapasitas institusional, bukan semata besaran anggaran.

Sasaran Prioritas dan Penguatan Ekonomi Produktif

Sasaran prioritas Dana Desa di Purwosari mencakup kelompok tani, UMKM, BUMKAL, pengembangan produk unggulan desa, masyarakat penyandang disabilitas, lansia, masyarakat miskin, pengelola peternakan, kader masyarakat, dan pelaksana padat karya. Dari sisi alokasi, program mencakup ketahanan pangan, BLT, lembaga pendidikan, kegiatan ekonomi BUMKAL, sarana pendukung pertanian, dan infrastruktur permukiman¹⁵.

Ketahanan pangan menjadi salah satu prioritas yang kuat melalui pertanian dan peternakan. Keberhasilannya ditunjang oleh pengawasan dan pendampingan, pemetaan potensi alam lokal, serta akurasi data kelompok. Temuan ini menunjukkan bahwa program produktif memerlukan kombinasi antara modal, pendampingan, dan tata kelola. Anggaran tanpa kapasitas pengelolaan berisiko menghasilkan kegiatan yang tidak berkelanjutan.

Reorientasi dari infrastruktur menuju ekonomi produktif menghadapi trade-off. Infrastruktur dasar masih diperlukan untuk aksesibilitas, keselamatan, mobilitas, dan pelayanan dasar, sedangkan kegiatan ekonomi produktif membutuhkan waktu, pendampingan, kapasitas SDM, dan keberanian mengelola risiko. Penelitian menemukan bahwa hambatan mendasar bukan hanya keterbatasan anggaran, tetapi keterbatasan kapasitas untuk mengubah anggaran menjadi kegiatan ekonomi produktif yang berkelanjutan.

Perspektif Pemangku Kepentingan dan Tata Kelola Kolaboratif

Project map menunjukkan pembagian perspektif berdasarkan fungsi aktor. Pemerintah kabupaten memosisikan Dana Desa sebagai instrumen pembangunan berbasis potensi lokal, termasuk pengembangan kegiatan ekonomi, wisata, dan infrastruktur. Carik menekankan good governance melalui transparansi, akuntabilitas, musyawarah, pengawasan, dan partisipasi. BUMKAL berorientasi pada kegiatan ekonomi produktif, ketahanan pangan, pengembangan potensi, dan kolaborasi. Kapanewon berperan dalam pembinaan, pengawasan, sinkronisasi regulasi, perencanaan berbasis data, dan pengembangan potensi. BAMUSKAL berfungsi sebagai representasi masyarakat dan pengawas kebijakan¹⁶.

Terdapat empat irisan perspektif yang penting. Pertama, pengembangan potensi setiap kabupaten menjadi perhatian Lurah, BUMKAL, dan Panewu. Kedua, partisipasi masyarakat menjadi perhatian Carik, Kabupaten, BUMKAL, dan Kapanewon. Ketiga, perencanaan Dana Desa menjadi titik temu BAMUSKAL dan Kapanewon. Keempat, pengawasan dan pendampingan ketahanan pangan menjadi titik temu Carik dan BUMKAL. Pola ini menunjukkan berkembangnya tata kelola kolaboratif, karena efektivitas Dana Desa tidak ditentukan oleh satu aktor melainkan oleh hubungan antarlembaga.

Temuan tersebut juga menegaskan pentingnya adaptasi terhadap kondisi geografis. Keterbatasan sumber air dan karakter wilayah tidak hanya menjadi kendala, tetapi membentuk pilihan

¹⁵ Nur, Syamsir, et al. "Pengembangan Usaha Ekonomi Produktif Melalui BUMDes Dalam Mendukung Pemulihan Ekonomi Pedesaan di Kecamatan Konda Kabupaten Konawe Selatan Provinsi Sulawesi Tenggara." *DINAMIS: Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat* 2.2 (2022): 107-111.

¹⁶ Firman, Firman, and Restu Rahmawati. "Tata Kelola Smart City Dalam Perspektif Collaboratif Governance." *The Indonesian Journal of Public Administration (IJPA)* 9.1 (2023).

strategi ekonomi yang lebih adaptif, seperti peternakan, ketahanan pangan, dan usaha berbasis sumber daya lokal. Dengan demikian, strategi ekonomi lokal di Purwosari lebih tepat dipahami sebagai resource adapting, yaitu menyesuaikan kegiatan ekonomi dengan kondisi dan sumber daya yang tersedia.

Model Optimalisasi Dana Desa

Berdasarkan mind map dan sintesis temuan, kinerja Dana Desa di Purwosari dapat dipahami melalui empat alur¹⁷. Pertama, input berupa landasan kebijakan dan tata kelola yang menekankan transparansi, akuntabilitas, partisipasi, pemetaan potensi, monitoring ketahanan pangan, dan kolaborasi lintas sektor. Kedua, proses berupa integrasi pembangunan infrastruktur dengan penguatan kelembagaan, pertumbuhan ekonomi, dan ketahanan pangan. Ketiga, output berupa pengentasan kemiskinan, peningkatan layanan publik, pendidikan dan kesehatan, serta dukungan ekonomi desa. Keempat, outcome berupa integrasi wisata dan ekonomi, keberhasilan ketahanan pangan, kemandirian unit usaha, dan kemampuan beradaptasi terhadap perubahan anggaran.

Model tersebut menunjukkan bahwa optimalisasi Dana Desa merupakan rantai kebijakan, bukan sekadar keputusan alokasi anggaran. Kualitas input menentukan proses, proses menentukan output, dan output baru memiliki nilai strategis ketika menghasilkan outcome yang berkelanjutan. Oleh karena itu, penguatan SDM, BUMKAL, pendampingan UMKM, perencanaan berbasis data, partisipasi masyarakat, dan monitoring harus ditempatkan sebagai bagian inti dari kebijakan, bukan pelengkap.

Penelitian juga menemukan ketergantungan fiskal kalurahan terhadap dana transfer. Dominasi transfer memperkuat kapasitas belanja tetapi belum otomatis menghasilkan kemandirian fiskal. Dana Desa akan lebih transformatif apabila digunakan untuk memperkuat aktivitas ekonomi yang menghasilkan nilai tambah, meningkatkan produktivitas, memperkuat BUMKAL dan kelompok usaha, serta pada akhirnya memperluas basis Pendapatan Asli Desa. Karena penelitian ini kualitatif, indikasi ketergantungan tersebut digunakan sebagai perspektif analitis dan bukan sebagai pembuktian ekonometrik terhadap flypaper effect.

KESIMPULAN

Penelitian ini menunjukkan bahwa Dana Desa di lima kalurahan Kapanewon Purwosari telah dikelola sesuai dengan ketentuan administratif dan dimanfaatkan untuk mendukung pembangunan serta pengembangan ekonomi lokal. Pada 2025, pemanfaatan Dana Desa mencakup ketahanan pangan, pengembangan kemandirian ekonomi, ekonomi kreatif, penguatan BUMKAL, serta pembangunan fisik dan nonfisik. Namun, penurunan alokasi anggaran pada 2026 mendorong kalurahan melakukan penyesuaian terhadap skala dan prioritas kegiatan. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa kemampuan Dana Desa dalam menjadi instrumen penggerak ekonomi lokal sangat dipengaruhi oleh kapasitas fiskal dan kemampuan kalurahan dalam menetapkan prioritas pembangunan.

Optimalisasi Dana Desa tidak hanya ditentukan oleh besarnya anggaran yang tersedia, tetapi juga oleh kualitas tata kelola, partisipasi masyarakat, kapasitas sumber daya manusia, kepemimpinan, dan koordinasi antarpemangku kepentingan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa orientasi Dana Desa menuju kegiatan ekonomi produktif masih menghadapi trade-off dengan kebutuhan

¹⁷ Ayri, Dicky Dwi Putra, Jumiati Jumiati, and Boni Saputra. "Optimalisasi Alokasi Dana Desa dalam Peningkatan Perekonomian Masyarakat di Nagari Bomas Solok Selatan." *PUBLICNESS: Journal of Public Administration Studies* 4.1 (2025): 125-133.

pembangunan infrastruktur dasar. Di sisi lain, keterbatasan kapasitas kelembagaan BUMKAL, kemampuan pengelolaan usaha, akses pasar, serta kapasitas pelaku UMKM menjadi faktor yang membatasi keberlanjutan manfaat ekonomi dari program yang didanai Dana Desa.

Dari perspektif pemangku kepentingan, pengelolaan Dana Desa melibatkan pembagian peran yang saling melengkapi antara pemerintah kabupaten, pemerintah kecamatan, BUMKAL, BUMKAL, dan masyarakat. Sasaran program terutama diarahkan kepada kelompok yang memiliki kebutuhan dan potensi ekonomi, seperti masyarakat berpendapatan rendah, kelompok tani, peternak, pelaku UMKM, pelaku ekonomi kreatif, dan kelompok masyarakat lainnya. Temuan ini menegaskan bahwa keberhasilan optimalisasi Dana Desa lebih ditentukan oleh kemampuan membangun ekosistem ekonomi lokal daripada sekadar meningkatkan realisasi atau serapan anggaran.

Berdasarkan temuan tersebut, optimalisasi Dana Desa di Kabupaten Purworejo perlu diarahkan pada alokasi yang adaptif terhadap potensi lokal, penguatan BUMKAL dan UMKM, peningkatan kapasitas kewirausahaan dan manajemen, perluasan akses pasar dan pemasaran digital, serta penguatan partisipasi masyarakat dalam seluruh tahapan pengelolaan Dana Desa. Selain itu, diperlukan sistem monitoring dan evaluasi berbasis *outcome* yang menilai perubahan produktivitas, perkembangan usaha, kesempatan kerja, akses pasar, dan manfaat ekonomi masyarakat, bukan hanya tingkat serapan anggaran. Dengan pendekatan tersebut, Dana Desa berpotensi lebih optimal sebagai instrumen pembangunan yang tidak hanya menghasilkan output pembangunan, tetapi juga memperkuat kemandirian dan keberlanjutan ekonomi lokal.

DAFTAR PUSTAKA

- Ahmad, Zakly Hanafi, Mukhammad Akhmad Najich Alfayn, and Akhdiva Elfi Istiqoh. "Analisis Upaya Strategis dalam Memaksimalkan Penerapan Pelayanan Publik Berbasis E-Government di Desa." *Jurnal Ilmiah Universitas Batanghari Jambi* 22, no. 3 (2022): 1432–1437.
- Ayri, Dicky Dwi Putra, Jumiaty Jumiaty, and Boni Saputra. "Optimalisasi Alokasi Dana Desa dalam Peningkatan Perekonomian Masyarakat di Nagari Bomas Solok Selatan." *PUBLICNESS: Journal of Public Administration Studies* 4, no. 1 (2025): 125–133.
- Diartika, Firda, and Retno Widodo Dwi Pramono. "Program Pembangunan Kawasan Perdesaan: Strategi Pengembangan Desa Berbasis Keterkaitan Desa-Kota." *Jurnal Pembangunan Wilayah dan Kota* 17, no. 4 (2021): 372–384.
- Firman, Firman, and Restu Rahmawati. "Tata Kelola Smart City dalam Perspektif Collaborative Governance." *The Indonesian Journal of Public Administration (IJPA)* 9, no. 1 (2023).
- Hamzah, Asep. "Strategi Pengembangan UMKM Desa Cibingbin Menuju Entrepreneurs Village Berbasis Sumberdaya Alam." *Jurnal Pengabdian Dinamika* 9, no. 2 (2022): 36–44.
- Hidayatullah, Fitra Ayuningtyas, and Tri Suminar. "Strategi Pemberdayaan Masyarakat Berbasis Potensi Lokal Candi Plaosan melalui Program Desa Wisata untuk Kemandirian Ekonomi di Desa Bugisan Kecamatan Prambanan Kabupaten Klaten." *Lifelong Education Journal* 1, no. 1 (2021): 1–11.
- Jubaedah, Siti, and Otto Fajarianto. "Model Pengembangan Desa Wisata Berbasis Kearifan Lokal sebagai Strategi Peningkatan Ekonomi Masyarakat di Desa Cupang Kecamatan Gempol Kabupaten Cirebon." *Abdimas Awang Long* 4, no. 1 (2021): 1–12.
- Mappasere, Stambol A., and Naila Suyuti. "Pengertian Penelitian Pendekatan Kualitatif." In *Metode Penelitian Sosial*, 1–10. 2019.

- Muiz, Rizqi Nuralili, et al. "Dinamika dan Strategi Implementasi Kompensasi di Satuan Pendidikan." *Jurnal Administrasi Pendidikan Islam* 7, no. 2 (2025): 162–175.
- Musianto, Lukas S. "Perbedaan Pendekatan Kuantitatif dengan Pendekatan Kualitatif dalam Metode Penelitian." *Jurnal Manajemen dan Kewirausahaan* 4, no. 2 (2002): 123–136.
- Nur, Syamsir, et al. "Pengembangan Usaha Ekonomi Produktif melalui BUMDes dalam Mendukung Pemulihan Ekonomi Pedesaan di Kecamatan Konda Kabupaten Konawe Selatan Provinsi Sulawesi Tenggara." *DINAMIS: Jurnal Pengabdian kepada Masyarakat* 2, no. 2 (2022): 107–111.
- Pratama, Fajar Giri, and Ganjar Kurnia. "Strategi Pengembangan Desa Wisata Berbasis Masyarakat (Studi Kasus: Desa Lebakmuncang, Kecamatan Ciwidey, Kabupaten Bandung)." *Jurnal Ilmiah Mahasiswa Agroinfo Galuh* 5, no. 1 (2019): 1014–1028.
- Rachman, Rani Auliawati, Dadang Sugiana, and H. Rohanda. "Strategi Sukses Transformasi Perpustakaan Desa Berbasis Inklusi Sosial untuk Masyarakat Sejahtera (Studi pada Perpustakaan Desa Gampingan Gemar Membaca Malang)." *Seminar Nasional MACOM III Universitas Padjadjaran*, vol. 908. 2019.
- Rahmatillah, Tri Putri, et al. "Strategi Pengembangan Desa Wisata Berbasis Wisata Alam dan Budaya sebagai Media Promosi Desa Sangiang." *Jurnal Planoeearth* 4, no. 2 (2019): 111–116.
- Sujarweni, V. Wiratna. *Metodologi Penelitian*. Yogyakarta: Pustaka Baru Press, 2014.
- Surayya, Rahmi. "Pendekatan Kualitatif dalam Penelitian Kesehatan." *AVERROUS: Jurnal Kedokteran dan Kesehatan Malikussaleh* (2015): 75–83.
- Sutiarso, M. A., et al. "Strategi Pengembangan Pariwisata Berbasis Budaya di Desa Selumbung, Karangasem-Bali." *Jurnal Pariwisata Budaya* 3, no. 2 (2018): 15–23.